

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PELAKU UMKM DI KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR

Muhammad Ilham Ismail¹⁾, Sitti Marhumi²⁾, Muhammad Akib³⁾

¹Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

email: ilham34312@gmail.com

²Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

email: sitti.mahrumi@unismuh.ac.id

³Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar

email: haagussalim31@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the Role of Government in Developing the Competence of SME sectors in Galesong Selatan District, Takalar Regency. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The data processed are the results of interviews conducted with 5 informants, namely the Head of Government, Head of Economics, Wholesale Figures, Craftsmen, Street Vendors. The data collection methods used in this study are observation, interviews and documentation. The results of the study are that the Government plays an active role in developing the competence of SME sectors in South Galesong District through product innovation training, development of SME (small medium enterprise) training. This program aims to improve skills, competitiveness, and marketing of local products, so that MSMEs can contribute more to the regional economy.

Keywords: *Role of Government, Development of SME Actor Competence*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara yang dilakukan pada 5 orang informan yakni Kasi Pemerintahan, Kasi Perekonomian, Tokoh Grosir, Pengrajin, Pedagang Kaki Lima. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang di dapat adalah Pemerintah berperan aktif dalam pengembangan kompetensi pelaku UMKM di Kecamatan Galesong Selatan melalui pelatihan inovasi produk, pengembangan sentra UMKM, dan pelatihan kewirausahaan. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan, daya saing, dan pemasaran produk lokal, sehingga UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengakui peran strategis UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai kebijakan dan program disusun untuk meningkatkan daya saing

UMKM, salah satunya dengan meningkatkan kompetensi para pelakunya. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk membina dan memberikan dorongan kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan untuk berwirausaha, melalui sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan kegiatan wirausaha ekonomi yang bisa dimiliki satu orang maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Anto et al., 2023)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategi dalam perekonomian Indonesia. UMKM telah terbukti menjadi penggerak utama perekonomian, khusus dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Di berbagai kecamatan, termasuk di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat setempat. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, pelaku UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan utama yang menghambat perkembangan usaha mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kompetensi pelaku UMKM, baik dari segi manajerial, keuangan, pemasaran, hingga teknologi.

Menurut Tambunan (2019), UMKM adalah sektor usaha yang berperan penting dalam penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di negara berkembang. Tambunan menekankan bahwa UMKM sering kali mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang berfluktuasi karena kemampuan mereka beradaptasi dengan pasar lokal dan kemauan untuk terus berinovasi dalam skala kecil.

Pengembangan SDM melingkupi beberapa hal yang cukup luas dalam organisasi, secara umum pengembangan SDM didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mempelajari keahlian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kerja saat ini dan yang akan datang (Gozali et al., 2021). Pengembangan SDM baik dilakukan kepada para pengelola usaha, tidak hanya pemilik, hal ini diakibatkan pengelola termasuk ke dalam pelaku usaha yang terjun langsung dalam mengelola operasional bisnis secara regular. Lebih lanjut, pengembangan kompetensi SDM menjadi penting dalam strategi penguatan bisnis baik kompetensi manajerial, praktik, prosedural, kerja sama, kedisiplinan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas (Eka et al., 2022)

Kompetensi merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi kinerja bisnis. Hasil penelitian yang dilakukan Ardiana, Brahmayanti, menemukan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kinerja usaha. Semakin tinggi kompetensi, dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga, aspek pengembangan SDM sangat dibutuhkan oleh sektor usaha, baik itu pengelola, pelaksana serta pemilik (Hamidi et al, 2021). Di sisi makro, strategi pembangunan sektor industri menjadi pijakan untuk mengembangkan tingkat perekonomian (Bashir et al., 2020). Salah satu sektor penting sebagai penggerak roda perekonomian, khususnya di negara berkembang, adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Naufalin, 2020).

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah melaksanakan berbagai program pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam hal manajemen keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk. Namun, efektivitas program-program ini masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya dapat memanfaatkan hasil dari pelatihan yang diberikan, baik karena keterbatasan waktu maupun minimnya pendampingan lanjutan setelah pelatihan.

Program-program pengembangan kompetensi yang disediakan pemerintah sering kali bersifat umum dan tidak spesifik sesuai kebutuhan lokal. Setiap UMKM di Kecamatan

Galesong Selatan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri, tergantung pada sektor usaha dan skala bisnis mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih spesifik dan terarah dalam memberikan pelatihan dan para pelaku UMKM. Pemerintah harus mampu menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga pengembangan kompetensi pelaku UMKM bisa optimal.

Peran pemerintah juga dibutuhkan dalam hal pemberian akses terhadap permodalan. Banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses modal usaha, baik karena kurangnya informasi mengenai sumber-sumber pembiayaan maupun kendala administratif. Pemerintah harus lebih proaktif dalam memberikan informasi mengenai akses pembiayaan, serta memfasilitasi kerja sama dengan lembaga keuangan agar pelaku UMKM bisa mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Pemerintah perlu memperhatikan infrastruktur pendukung yang memadai untuk pengembangan UMKM. Di Kecamatan Galesong Selatan, infrastruktur yang baik akan memudahkan distribusi produk, serta mendorong daya saing UMKM lokal. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa akses jalan, sarana transportasi, dan fasilitas publik lainnya tersedia dan dalam kondisi yang baik, sehingga aktivitas usaha UMKM dapat berjalan lancar.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga penting dalam upaya pengembangan kompetensi pelaku UMKM. Pemerintah daerah, dalam khususnya Kabupaten Takalar, harus bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini dan penyelenggaraan program-program pengembangan UMKM. Selain itu, pemerintah juga bisa menjalin kerja sama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah dalam menyediakan program pelatihan dan pendamping yang berkualitas.

Pemerintah juga dapat berperan dalam mempromosikan produk-produk UMKM lokal ke pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional. Melalui pameran, bazar, dan kegiatan promosi lainnya, produk-produk UMKM di Kecamatan Galesong Selatan dapat lebih dikenal oleh konsumen. Promosi yang efektif akan meningkatkan daya jual produk, sekaligus memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

Pengembangan kompetensi pelaku UMKM juga harus didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berwirausaha. Pemerintah bisa melibatkan masyarakat dalam program-program kewirausahaan, sehingga lebih banyak orang yang terlibat dalam sektor UMKM. Semakin banyaknya pelaku UMKM yang kompeten, ekonomi lokal di Kecamatan Galesong Selatan dapat tumbuh lebih kuat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam suatu organisasi atau perusahaan peranan manajemen sumber daya manusia sangatlah penting. Hal ini dapat kita ketahui karena tanpa sumber daya manusia, suatu organisasi tidak mungkin berjalan. Manusia merupakan penggerak dan pengelola faktor-faktor produksi lainnya seperti modal, bahan mentah, peralatan, dan lain-lain untuk mencapai tujuan organisasi. Didalam pengembangan perusahaan, sumber daya manusia faktor terpenting pendukung berlangsungnya suatu perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pemerintah

Kata pemerintahan berbeda dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda.

Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif (Sugiman, 2018).

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negaran memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan pemerintah pusat (Sugiman, 2018).

Pengembangan kompetensi UMKM

Pengertian Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku UMKM agar dapat bersaing secara efektif di pasar. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan manajerial, penguasaan teknologi, strategi pemasaran, hingga kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Tujuan utama pengembangan kompetensi UMKM adalah untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang lebih handal dan inovatif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan aspek penting dalam pengembangan kompetensi UMKM adalah pelatihan dan pendidikan.

Pelatihan tersebut dapat mencakup berbagai topik seperti manajemen bisnis, pemasaran digital, pengelolaan keuangan, dan inovasi produk. Pendidikan dan pelatihan ini krusial mengingat banyak pelaku UMKM yang memulai bisnis dengan pengetahuan terbatas dalam bidang bisnis atau manajemen. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan formal maupun informal menjadi bagian integral dalam mengembangkan kompetensi pelaku usaha (Waqfin et al., 2021).

Faktor-faktor Pengembangan Kompetensi UMKM

- a. Pelatihan dan pendidikan salah satu faktor utama dalam pengembangan kompetensi UMKM adalah pelatihan dan pendidikan, program pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk memperbarui keterampilan teknis dan manajerial pelaku UMKM (Wibowo et al., 2023)
- b. Teknologi dan inovasi penerapan teknologi merupakan faktor penting lainnya dalam pengembangan kompetensi UMKM. Di era digital, UMKM harus mampu mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, misalnya dengan penggunaan sistem pencatatan keuangan yang terintegrasi.
- c. Pendampingan dan Konsultasi Bisnis Pendampingan bisnis menjadi faktor krusial dalam proses pengembangan kompetensi UMKM. Melalui pendampingan ini, para pelaku UMKM mendapat arahan dalam mengelola usaha secara profesional.
- d. Kerja Sama Antar Pelaku UMKM Kolaborasi antar pelaku UMKM menjadi faktor penting dalam peningkatan kompetensi. Dengan kerja sama, pelaku UMKM dapat saling berbagi informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Kolaborasi juga dapat memperkuat posisi mereka dalam menghadapi tantangan pasar serta meningkatkan inovasi produk. Forum atau komunitas UMKM bisa menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk saling belajar dan berbagi praktik bisnis terbaik.

- e. Dukungan Pemerintah, Pemerintah memiliki peran signifikan dalam pengembangan kompetensi UMKM, terutama melalui kebijakan yang mendukung ekosistem usaha. Program-program pelatihan, penyediaan akses pembiayaan, dan pembentukan regulasi yang mendukung menjadi salah satu wujud peran pemerintah dalam mendorong pengembangan kompetensi. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengikuti pameran-pameran nasional dan internasional guna memperluas jaringan bisnis(Wibowo et al., 2023)

UMKM

Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan implikasi dari pembagian atau kriteria usaha dalam konteks di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat kriteria tersebut akan memberikan dampak pada penentuan kebijakan usaha yang terkait. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Usaha mikro merupakan usaha formal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditi usaha yang dilakukan sering berganti-ganti, lokasi usaha yang terkadang kurang tetap, umumnya tidak dilayani oleh perbankan, dan tidak banyak yang memiliki legalitas usaha(Sofyan, 2017).

Ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Terdapat beberapa ciri usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu:

- a. Jenis komoditi yang diusahakan tidak tetap dan bisa berganti sewaktu-waktu bisa berpindah;
- b. belum menerapkan kegiatan administrasi dalam menjalankan usahanya, bahkan sering kali tidak bisa membedakan keperluan keuangan untuk pribadi maupun keuangan usaha;
- c. Sumber daya manusia (SDM) di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni;
- d. Biasanya tingkat pendidikan SDM nya masih rendah;
- e. Para pelaku UMKM biasanya belum mempunyai jaringan perbankan, akan tetapi sebagian dari mereka telah mempunyai jaringan ke lembaga-lembaga keuangan bukan bank;
- f. Umumnya para pelaku usaha kecil belum mendapatkan bukti legalitas atau surat ijin usaha, seperti nomor pokok wajib pajak(NPWP)

Manfaat UMKM

1. Penyumbang Terbesar Produk Domestic

Manfaat bisnis sektor UMKM adalah meningkatnya produk yang dihasilkan oleh dalam negeri. Produk-produk yang ada tidak hanya akan merambah pasar nasional saja tapi juga produk dalam negeri bisa merambah pasar internasional. Produk lokal banyak diminati oleh banyak orang. Contohnya produk kerajinan. Produk kerajinan dari Indonesia juga banyak yang terkenal sampai di luar negeri.

2. Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Tidak dapat disangkal lagi bahwa sektor UMKM secara tidak langsung membuka peluang bagi orang-orang untuk mendapatkan pekerjaan.

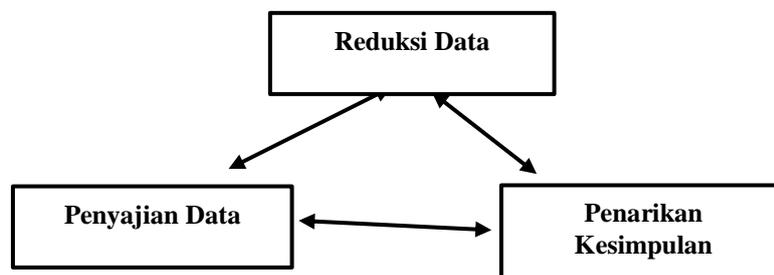
3. Solusi Masyarakat Kelas Menengah

Modal yang diperlukan untuk membuka usaha dalam sektor UKM ini tidaklah susah. Bisa dikatakan mudah. Banyak sudah lembaga pemerintah yang membantu untuk memberikan bantuan dana modal dengan jumlah nilai kredit yang kecil. Saat ini bank juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai perkreditan yang kecil.

METODE PENELITIAN

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*). Fokus penelitian kualitatif ini sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pengembangan Kompetensi Pelaku UMKM di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar sehingga dapat diketahui manfaat dana desa bagi pengembangan Umkm di Kecamatan Galesong Selatan.

Gambar 1 Metode Analisis Data



HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan informasi pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian. Berikut ini penjelasannya

1. Identitas Informan

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1.	Muh. Ilham, SE	MI	Kasi Pemerintahan	1 Orang
2.	Rahmatia R, S.Ag	RR	Kasi Perekonomian	1 Orang
3.	Muh. Adnang	MA	Kios	1 Orang
4.	Nana Mardiana	NM	Pengrajin	1 Orang
5.	Bahtiar	B	Pedagang Kaki lima	1 Orang

Berdasarkan table di atas , dapat dijelaskan bahwa informan berjumlah 5 orang, terdapat pemerintah 2 dan pelaku Umkm 3 untuk pengembangan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Hasil Wawancara

Bagian ini menggambarkan mengenai deskripsi data penelitian khususnya yang berhubungan dengan informasi penelitian yaitu bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan kompetensi pelaku UMKM di Galesong Selatan Kabupaten Takalar , selain itu juga akan di jelaskan terkait bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, peneliti pertama melakukan interkasi dengan masyarakat terkait dengan pengembangan UMKM yang ada di kecamatan galesong Selatan kabupaten takalar, peneliti menggali informasi mengenai rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti maka dalam menggali data sesuai pedoman wawancara, peneliti menyelidiki tentang peran pemerintah dalam pengembangan UMKM. Agar terdeskripsi data hasil penelitian sesuai urutan pedoman wawancara, yakni sebagai berikut.

Program Pelatihan

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pemerintahan pada hari Senin 20 Januari 2025 dengan pertanyaan Apa saja pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM? MI mengatakan bahwa:

“biasanya pemerintah memberikan pelatihan seperti, pelatihan digitalisasi UMKM, pelatihan jaringan dan kemitraan”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Perekonomian pada hari Senin 20 Januari 2025 dengan pertanyaan Apa saja pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?, RR mengatakan bahwa:

“Manajemen bisnis, pemasaran digital, keuangan, legalitas usaha, inovasi produk, serta pelatihan teknis sesuai sektor usaha”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM kios pada hari Sabtu 1 Februari 2025 dengan pertanyaan Apa saja pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?, MA mengatakan bahwa:

“Pemerintah memberikan pelatihan pemasaran digital, pengelolaan keuangan serta keterampilan”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM pengrajin Pada hari Minggu 2 Februari 2025 dengan pertanyaan Apa saja jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?, NM mengatakan bahwa:

“Pemerintah biasanya memberikan berbagai jenis pelatihan kepada kami pengrajin songkok guru, seperti Pelatihan keterampilan produksi: Meliputi teknik pembuatan songkok yang lebih modern dan efisien tanpa menghilangkan nilai tradisional”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM pedagang kaki lima pada hari Minggu 2 Februari 2025 dengan pertanyaan Apa saja jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM?, B mengatakan bahwa:

“Pemerintah sering memberikan pelatihan kepada kami pedagang kaki lima dalam berbagai aspek usaha, seperti manajemen keuangan sederhana, strategi pemasaran digital”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sebagai pelaku umkm perlu untuk mengembangkan usaha atau mengikuti pelatihan dan menganalisis trend pasar ataupun kompetensi untuk mengembangkan usaha itu ada beberapa cara yang dilakukan seperti mengatur keuangan dan juga bagaimana melakukan keterampilan di saat ada di lapangan.

Melakukan Sosialisasi

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pemerintahan pada hari Senin 20 Januari 2025 dengan pertanyaan Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil? MI Mengatakan bahwa:

“Pemerintah dapat memastikan sosialisasi benar-benar menjangkau pelaku UMKM di daerah terpencil dan strategi yang di lakukan yaitu pendekatan berbasis komunitas, melibatkan tokoh masyarakat atau ketua kelompok UMKIM dan pemanfaatan teknologi”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Perekonomian pada hari Senin 20 Januari 2025 dengan pertanyaan Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM? RR mengatakan bahwa:

“Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, media digital, serta kunjungan langsung”

“Hasil wawancara yang dilakukan dengan Pelaku UMKM Tokoh grosir pada hari Sabtu 1 Februari 2025 dengan pertanyaan Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM? MA mengatakan bahwa:

“Biasanya pemerintah melakukan pendampingan lapangan dan bekerja pemerintah daerah untuk memastikan informasi”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM Pengrajin pada hari Minggu 2 Februari 2025 dengan pertanyaan Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMIM? NM mengatakan bahwa:

“Dari pengalaman kami, sosialisasi ke daerah terpencil masih kurang optimal. Banyak pelaku UMKM di desa yang tidak mengetahui program yang ada karena kurangnya akses internet atau keterbatasan media komunikasi”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku UMKM pedagang kaki lima pada hari Minggu 2 Februari 2025 dengan pertanyaan Bagaimana pemerintah memastikan bahwa sosialisasi yang dilakukan benar-benar menjangkau pelaku UMKM? B mengatakan bahwa:

“Pemerintah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, seperti mengadakan pertemuan langsung melalui dinas terkait, menggunakan media sosial”

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang telah dilakukan pada informan bahwa dengan berkolaborasi, UMKM dapat mengurangi biaya produksi melalui pembelian bahan baku secara kolektif atau berbagai sumber daya produksi, sehingga meningkatkan efisiensi operasional mereka, dan bertukar ide dengan UMKM lain atau mendorong inovasi produk dan layanan. Dan melalui kerja sama dengan organisasi

seperti perbankan, lembaga keuangan mikro, atau program bantuan pemerintah, UMKM bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap modal usaha, kredit berbunga rendah, atau hibah pengembangan usaha.

Pembahasan

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kompetensi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Galesong Selatan, Kabupaten Takalar. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program pelatihan, dan sosialisasi serta bantuan modal dan pemasaran yang bertujuan meningkatkan daya saing pelaku usaha. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah penyelenggaraan pelatihan keterampilan bisnis, manajemen usaha, dan pemanfaatan teknologi digital. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Pemerintah juga memiliki peran dalam meningkatkan kompetensi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing dan berkembang di tengah tantangan ekonomi. Salah satu peran utama pemerintah adalah menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Kebijakan tersebut meliputi regulasi yang mempermudah perizinan usaha, pemberian insentif pajak, serta perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Dengan adanya regulasi yang berpihak pada UMKM, para pelaku usaha kecil dapat lebih mudah mengembangkan bisnisnya tanpa terbebani oleh prosedur.

Selain kebijakan, pemerintah juga berperan dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada pelaku UMKM guna meningkatkan keterampilan mereka. Berbagai program pelatihan seperti manajemen keuangan, strategi pemasaran, dan penggunaan teknologi digital diselenggarakan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi operasional mereka. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan, organisasi bisnis, serta sektor swasta untuk memberikan pendampingan dan bimbingan teknis agar UMKM lebih profesional dalam menjalankan usahanya.

pemerintah juga berperan dalam memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku UMKM. Banyak UMKM di Galesong Selatan menghadapi kendala dalam memperoleh modal usaha akibat keterbatasan jaminan dan tingginya suku bunga pinjaman di lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai skema bantuan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan hibah modal usaha dapat membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani biaya bunga yang tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM menjadi bagian dari peran pemerintah dalam pengembangan kompetensi pelaku usaha. Regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti kemudahan perizinan usaha, perlindungan hak cipta, serta insentif pajak, akan memberikan lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Selain itu, pendampingan dan konsultasi bisnis yang diberikan oleh pemerintah juga berperan dalam meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait aspek legalitas usaha. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan UMKM di Galesong Selatan dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

SIMPULAN

Pemerintah berperan aktif dalam pengembangan kompetensi pelaku UMKM di Kecamatan Galesong Selatan melalui pelatihan inovasi produk, pengembangan sentra UMKM, dan pelatihan kewirausahaan. Program ini bertujuan meningkatkan keterampilan, daya saing,

dan pemasaran produk lokal, sehingga UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Anto, R. P., Rahmatyah, S., Amir, M., Gunawan, G., Sahili, L. O., Habiba, N., & Saputri, A. (2023). Penyuluhan Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Kompetensi Kewirausahaan Pelaku Usaha Penjual Jagung Rebus di Desa Amesiu. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 8–14. <https://doi.org/10.37478/mahajana.v4i1.2509>
- Eka, D., Diah, Y. M., Taufik, T., Bunga, C. A. C., Putriana, V. N., Febianti, D., ... Arifuddin, Z. (2022). Peranan Kompetensi SDM dalam Meningkatkan Industri UMKM di Kecamatan Ilir Barat II Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 3(1), 39–44. <https://doi.org/10.29259/jscs.v3i1.56>
- Fadilah, A., Syahidah, A. nur'azmi, Risqiana, A., Nurmaulida, A. sofa, Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 892–896. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>
- Manongga, K. A. (2021). Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM. *Bilancia*, 11(1), 33–64.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 84–85.
- Siagian, S (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yayasan Drestanta Pelita Indonesia.
- Waqfin, M. S. I., Wulandari, S. R., Tifliya, F. M., Indrayani, S., Wahyudi, W., & Roziqin, M. K. (2021). Penerapan Digital Marketing Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan pada UMKM di Desa Kepuhdoko Jombang. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 155–159. https://doi.org/10.32764/abdimas_ekon.v2i3.2112
- Wibowo, A., Respati, D. K., Suparno, S., Saptono, A., Suherman, S., & Pahala, I. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Pelaku Umkm Di Desa Cibitung Tengah. *D'edukasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 23. <https://doi.org/10.25273/dedukasi.v3i1.16537>